



The Education Policy as Public Policy

Dewi Shinta Nuriyah^{*1}, Fajriyan Megawati Azani², Masduki Duryat³

*** dewishinta3011@gmail.com**

^{1,2,3} Manajemen Pendidikan Islam, UIN Siber Syekh Nurjati, Cirebon, Indonesia

ABSTRACT

Education is a fundamental right of every citizen and is also categorized as a public good, which the state is responsible for fulfilling. Therefore, education policy cannot be separated from the framework of public policy. This article examines the formulation, implementation, and evaluation processes of education policy from a public policy perspective, while also linking it to the role of educational management on a macro scale. Using a descriptive-qualitative approach, this article discusses the principles of educational management, the stages of policy formation, and the challenges faced during its implementation in Indonesia. The findings indicate that education policy, as an integral part of public policy, requires multi-stakeholder involvement and a multidisciplinary approach in order to respond to societal needs fairly and equitably. It is hoped that this study will contribute to a better understanding and strengthening of education policies that are more responsive and oriented toward social justice.

Keywords: education policy, public policy, educational management, education

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan fondasi utama dalam proses pembangunan nasional. Di Indonesia, pendidikan tidak hanya dilihat sebagai instrumen peningkatan kualitas sumber daya manusia, tetapi juga sebagai hak konstitusional warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab negara yang harus diatur melalui kebijakan publik. Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik (Gingga, 2020). Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik menjadi instrumen strategis negara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, memperluas akses, meningkatkan kualitas, dan merespons berbagai tantangan zaman yang terus berkembang.

Kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar kebijakan publik yang menekankan partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini penting agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat luas, bukan hanya keputusan sepihak dari pemerintah. Agar kebijakan pendidikan dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran, diperlukan pendekatan manajerial yang komprehensif. Manajemen pendidikan tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga proses perumusan, implementasi, serta evaluasi kebijakan yang berbasis kebutuhan publik.

Dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa di antaranya adalah birokrasi yang belum fleksibel, ketimpangan sumber daya antar wilayah, serta lemahnya koordinasi antar instansi yang terlibat dalam sektor pendidikan.

Oleh karena itu, penting untuk memandang kebijakan pendidikan melalui perspektif kebijakan publik, agar kebijakan yang dihasilkan lebih partisipatif, adaptif, dan berdampak nyata terhadap peningkatan akses dan mutu pendidikan secara merata (Friska et al., 2022). Seperti yang dikemukakan oleh Sutapa (2008), keberhasilan kebijakan pendidikan sangat bergantung pada sejauh mana ia dirancang dan dilaksanakan dengan memperhatikan kompleksitas masalah publik yang ada.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan pendidikan sebagai kebijakan publik. Dengan memahami bagaimana proses kebijakan berlangsung dan apa saja faktor penghambat serta pendukungnya, diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan tata kelola pendidikan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan literature review dari artikel penelitian. Review ini menggunakan metode evaluasi yang diawali dengan pertanyaan penelitian “Implementasi Kebijakan Pendidikan Sebagai Kebijakan Publik”. Penelusuran artikel melalui Google Scholar dengan kata kunci yang digunakan kebijakan pendidikan, kebijakan publik. Kriteria artikel yang digunakan yaitu dipublikasikan 20 tahun terakhir yaitu dari 2011 sampai 2024, jurnal mempunyai judul dan isi yang sesuai dengan tujuan penelitian, full text, dan keterkaitan dengan kebijakan. Hal ini bertujuan untuk kemutakhiran hasil riset dan keterbaruan pengambilan database. Kriteria eksklusi: (1) Artikel tidak memiliki struktur yang lengkap. (2) Berbentuk review artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan merupakan proses interaksi manusiawi yang ditandai keseimbangan antara kedaulatan subjek didik dengan kewibawaan pendidik, usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat, kiat dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional, yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan, agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai. Kebijakan dibuat mengacu pada paradigma baru pendidikan.

Kebijakan pendidikan adalah suatu bentuk strategi perencanaan yang disusun berdasarkan sistem nilai dan kebutuhan situasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Kebijakan ini disusun sebagai pedoman umum dalam pengambilan keputusan di sektor pendidikan dan merujuk pada paradigma baru yang menekankan kualitas, keadilan, dan relevansi.

Sebagai instrumen negara, kebijakan pendidikan tidak hanya memuat aspek teknis administratif, tetapi juga menyentuh pada dimensi sosial, kultural, dan politik. Oleh sebab itu, kebijakan pendidikan menuntut integrasi antara tujuan jangka panjang pembangunan nasional dengan realitas dan kebutuhan masyarakat di lapangan.

Dalam (Dewi, 2016) kebijakan pendidikan merupakan sebuah kebijakan publik, oleh sebab itu setiap program-program dalam dunia pendidikan adalah program-program yang dirancang oleh pemerintah dalam rangka mengatasi permasalahan yang ada dalam pendidikan demi memenuhi kewajiban pemerintah dalam hal memberikan pendidikan bagi setiap warga negaranya, sebuah kebijakan dibuat untuk mencapai suatu pedoman dalam bertindak dan mengarahkan kegiatan dalam organisasi pendidikan. Di simpulkan (Elwijaya, 2021) dari pernyataan (Bakry, 2010) yaitu kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik yang

mengelola khusus bidang pendidikan serta berhubungan dengan alokasi, penyerapan dan distribusi sumber pelaksanaan pendidikan maupun pengelolaan perilaku pendidikan. Seiring berjalannya tuntutan pembaharuan pendidikan di Indonesia, kebijakan pendidikan telah mengalami beberapa kali perubahan. Semenjak tahun 2003 telah diganti dengan undang-undang nomor 20 Tahun 2003, yang disahkan pada tanggal 11 Juni 2003. Dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 alenia keempat menyebutkan bahwa “mencerdaskan kehidupan bangsa,” dalam hal ini bangsa mencakup seluruh warga negara Indonesia baik warga yang belajar di sekolah-sekolah negeri, maupun yang belajar di sekolah swasta dalam hal ini kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik.

Kebijakan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional, negara seharusnya bertanggung jawab secara orisinil dan bertanggung jawab secara mutlak dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk mencerdaskan rakyat Indonesia. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, yang berakar pada nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggung jawab terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pembahasan

Pengertian Kebijakan Publik

Secara etimologis, istilah "kebijakan" berasal dari bahasa Inggris policy, yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai serangkaian konsep dan prinsip yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu tindakan, baik dalam konteks kepemimpinan, organisasi, maupun pemerintahan.

Publik adalah sekelompok orang (individu) yang masing-masing memiliki kepentingan dalam hubungan antar manusia (sosiologis). Istilah publik diserap dari bahasa Inggris publik yang secara etimologis berasal dari bahasa Latin, publicus yang berarti untuk orang for populus. Populus berasal dari kata populus berarti orang (people).

Kebijakan publik adalah suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan di depan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi. Serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (Leo Agustino, 2008:7). (D, 2020)

Menurut Leo Agustino dalam Taufiqurokhman (2021), kebijakan merupakan serangkaian usulan atau tindakan dari individu, kelompok, atau lembaga pemerintah dalam suatu sistem sosial tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang ada. Sementara itu, Abdul Wahab (2012) menyajikan sejumlah prinsip untuk memahami kebijakan, antara lain: kebijakan berbeda dengan keputusan, tidak bisa dilepaskan dari konteks administrasi, mencakup perilaku dan ekspektasi, hingga bersifat inklusif dan dapat didefinisikan secara subjektif.

Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan atau pilihan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. David Easton memandang kebijakan publik sebagai proses alokasi nilai secara paksa oleh otoritas kepada seluruh anggota masyarakat. Sedangkan Harold Lasswell menyebut kebijakan sebagai program untuk mencapai tujuan tertentu yang sarat dengan nilai-nilai dalam praktiknya. (D, 2020)

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, kebijakan publik dapat dimaknai sebagai suatu proses penyusunan dan pelaksanaan program oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyelesaikan persoalan masyarakat secara sistemik dan terukur.

Hubungan antara Kebijakan Publik dan Pendidikan

Kebijakan pendidikan secara esensial merupakan bagian dari kebijakan publik yang mengatur urusan pendidikan sebagai salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Dalam konteks manajemen pendidikan, kebijakan publik berperan dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan, mulai dari pengelolaan sumber daya, sistem kurikulum, hingga evaluasi mutu pendidikan.

Manajemen pendidikan secara makro merupakan penerapan prinsip-prinsip manajemen dalam sistem pendidikan, baik formal maupun nonformal. Fungsinya mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan dapat dikatakan sebagai produk dari proses manajerial yang dilakukan dalam konteks kebijakan publik.

Karena pendidikan merupakan *public goods*, maka tanggung jawab atas penyelenggaraannya tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada individu atau sektor swasta. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menyediakan layanan pendidikan yang merata dan berkualitas.

Kebijakan publik dapat memiliki dampak yang signifikan pada kebijakan pendidikan. Pemerintah dan lembaga publik lainnya dapat menggunakan kebijakan publik untuk mempromosikan akses dan kualitas pendidikan yang lebih baik. Dengan mengadopsi kebijakan publik yang tepat, pemerintah dan lembaga publik lainnya dapat meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan untuk seluruh warga negara. Sama halnya dengan kebijakan publik yang berdampak pada kebijakan pendidikan, kebijakan pendidikan juga memiliki dampak signifikan pada kebijakan publik secara keseluruhan. Dengan meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, kebijakan pendidikan dapat berdampak positif pada berbagai sektor kebijakan publik, seperti ekonomi, kesehatan, lingkungan, dan lain sebagainya. Dengan memperkuat kebijakan pendidikan, pemerintah dapat membantu memperkuat sektor-sektor kebijakan publik lainnya dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih luas.

Tujuan dari kebijakan pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan, memajukan sumber daya manusia, dan memenuhi kebutuhan masyarakat dan pasar kerja. Kebijakan pendidikan juga dapat membantu mempromosikan kesetaraan dan keadilan dalam akses dan manfaat pendidikan bagi seluruh warga negara.

Dalam (Prastiko, 2020) kebijakan Pendidikan merupakan suatu alat yang didalamnya terdapat berbagai kegiatan yang mengatur tentang pendidikan bagaimana cara melakukannya, seperti apa urutan kegiatannya, dan bagaimana hasil akhir terhadap pendidikan di Indonesia.

Landasan Hukum dan Kebijakan Pendidikan di Indonesia

Beberapa pemikir kebijakan publik seperti Harold D. Lasswell dan Carl J. Frederick menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan program yang disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu lingkungan sosial yang kompleks. David Easton bahkan menekankan bahwa kebijakan publik adalah bentuk pengalokasian nilai-nilai oleh negara kepada masyarakat.

Dalam konteks sistem pendidikan nasional, penyusunan kebijakan pendidikan harus memperhatikan realitas sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pasal 4 Ayat (1) menegaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia, agama, dan budaya bangsa. Sementara Pasal 4 Ayat (3) menegaskan bahwa pendidikan merupakan proses pemberdayaan peserta didik sepanjang hayat. (D, 2020)

Proses Pembentukan Kebijakan Pendidikan

Penyusunan kebijakan pendidikan merupakan bagian dari proses kebijakan publik yang

melibatkan berbagai tahapan sistematis. Proses ini diawali dengan identifikasi isu strategis dalam dunia pendidikan, seperti rendahnya pemerataan akses, kualitas pendidikan yang belum merata, serta relevansi kurikulum terhadap kebutuhan zaman.

Dalam praktiknya, proses ini melibatkan berbagai aktor, baik dari unsur pemerintah pusat seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga pemerintah daerah, akademisi, praktisi pendidikan, serta masyarakat. Perumusan kebijakan dilandasi oleh analisis data, kajian empirik, serta konsultasi publik agar kebijakan yang disusun benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Mengacu pada teori kebijakan publik oleh Dunn (2003), proses pembentukan kebijakan meliputi beberapa tahapan utama, yaitu: (1) perumusan masalah, (2) penyusunan alternatif kebijakan, (3) pemilihan kebijakan terbaik, (4) pelaksanaan kebijakan, dan (5) evaluasi kebijakan. Dalam konteks pendidikan, hal ini mencakup penyusunan regulasi, penyusunan kurikulum, pengembangan tenaga pendidik, serta penyesuaian terhadap dinamika global. (D, 2020)

Proses Penyusunan Kebijakan Publik

Proses penyusunan kebijakan publik dalam bidang pendidikan merupakan tahapan penting yang menentukan arah dan kualitas kebijakan yang akan dilaksanakan. Menurut teori Dunn (2003), proses kebijakan publik terdiri atas lima tahap utama: perumusan masalah, formulasi kebijakan, adopsi, implementasi, dan evaluasi. (D, 2020)

Dalam bidang pendidikan, perumusan dimulai dari identifikasi isu strategis seperti kesenjangan akses dan mutu pendidikan. Selanjutnya, formulasi kebijakan dilakukan melalui dialog dan partisipasi publik untuk menghasilkan rancangan yang komprehensif. Setelah diadopsi oleh lembaga pemerintah yang berwenang, kebijakan dilaksanakan dalam bentuk program-program pendidikan strategis. Evaluasi dilakukan secara periodik untuk menilai keberhasilan dan melakukan perbaikan kebijakan secara berkelanjutan.

Implementasi Kebijakan Pendidikan

Implementasi kebijakan pendidikan adalah tahap pelaksanaan kebijakan pendidikan setelah kebijakan tersebut dibuat dan disahkan. Tahap implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai langkah dan proses yaitu : perencanaan, merupakan tahap awal dari implementasi kebijakan pendidikan, pelaksanaan setelah rencana kebijakan pendidikan disusun, tahap selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan atau implementasi kebijakan, pengawasan pada tahap ini, dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan dan evaluasi, tahap terakhir dari implementasi kebijakan pendidikan adalah evaluasi. Hal ini seiring dengan penjelasan kebijakan publik dalam (Marsari, 2021) yang terdiri dari perancangan agenda, merumuskan kebijakan, pengadopsian kebijakan, pelaksanaan kebijakan dan penilaian kebijakan. (Sutapa, 2008)

Implementasi kebijakan pendidikan memerlukan koordinasi dan kerjasama yang baik antara pemerintah, institusi pendidikan, dan masyarakat. Jika implementasi kebijakan pendidikan berhasil, maka akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, seperti peningkatan kualitas pendidikan, meningkatkan daya saing di pasar kerja, dan memajukan kemajuan negara.

Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling terkait dan memiliki hubungan yang erat. Kebijakan pendidikan merupakan salah satu bentuk kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mengatur dan memajukan sistem pendidikan dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan tertentu.

Selama proses implementasi kebijakan pendidikan, berbagai kegiatan dan program dilaksanakan oleh pemerintah dan institusi terkait. Kegiatan-kegiatan tersebut membutuhkan

dukungan dan kerjasama dengan berbagai pihak, seperti masyarakat, industri, dan lembaga swadaya masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik juga berperan penting dalam menentukan kesuksesan implementasi kebijakan pendidikan.

Implementasi kebijakan pendidikan merupakan tahap pelaksanaan kebijakan pendidikan setelah kebijakan tersebut dibuat dan disahkan. Tahap implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai langkah dan proses, dimulai dari perencanaan yaitu, pemerintah dan institusi terkait membuat rencana yang berisi tujuan, strategi, dan langkah-langkah pelaksanaan kebijakan pendidikan yang akan dilakukan. Pelaksanaan merupakan, kebijakan pendidikan yang telah disusun akan dijalankan dengan melakukan berbagai kegiatan dan program, seperti penyediaan fasilitas pendidikan, peningkatan kualitas guru dan siswa, pengembangan kurikulum, dan lain-lain. Pengawasan ialah, dilakukannya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa kebijakan pendidikan yang telah dibuat dan dijalankan berjalan dengan baik dan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan masalah atau kendala, maka akan dilakukan perbaikan atau penyesuaian kebijakan, kemudian tahap terakhir evaluasi pada tahap ini, dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pendidikan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan pendidikan yang telah dibuat dan dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan kekurangan atau perlu perbaikan, maka akan dilakukan penyesuaian kebijakan.(Dwi et al., 2024), (FeriYanti, Y. G., Judijanto, L., Prananda, G., & Sanulita, 2024).

Pelaksanaan kebijakan pendidikan di Indonesia berlangsung dalam sistem desentralisasi, yang memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk turut menyusun dan menjalankan kebijakan pendidikan sesuai dengan konteks lokal. Desentralisasi ini membuka peluang partisipasi yang lebih luas dari berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk lembaga pendidikan dan masyarakat.

Salah satu bentuk implementasi kebijakan yang menonjol adalah penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), di mana kewenangan pengelolaan sekolah sebagian besar diberikan kepada satuan pendidikan. Melalui pendekatan ini, sekolah memiliki otonomi lebih besar dalam mengatur manajemen internal, termasuk pengelolaan anggaran, kurikulum, hingga peningkatan kompetensi pendidik.

Menurut Huda dkk. (2010), terdapat tiga tahapan utama dalam proses implementasi kebijakan pendidikan, yaitu:

1. Tahap Sosialisasi – Penyebaran informasi kebijakan kepada seluruh elemen terkait. Tantangan: resistensi terhadap perubahan.
2. Tahap Piloting – Uji coba terbatas kebijakan untuk mengukur efektivitas dan potensi kendala.
3. Tahap Diseminasi – Proses penyebaran kebijakan secara luas setelah melalui evaluasi dan penyempurnaan.

KESIMPULAN

Kebijakan pendidikan sebagai bagian dari kebijakan publik memegang peranan strategis dalam pembangunan sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Pendidikan sebagai public goods menuntut keterlibatan penuh dari negara untuk menjamin akses, mutu, dan pemerataan yang adil dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan harus dilakukan secara sistematis dan partisipatif, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan serta memperhatikan konteks sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat. Pendekatan manajemen pendidikan menjadi alat penting dalam memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan, adaptif, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan pendidikan tidak hanya sebagai respon teknis terhadap permasalahan pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk menciptakan perubahan sosial dan membangun peradaban bangsa yang maju, berkarakter, dan berdaya saing global.

Implementasi kebijakan pendidikan dan kebijakan publik saling mempengaruhi dan berhubungan erat dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bakry, A. (2010). Aka N Pendidikan. *Medtek*, 2.
- D, H. (2020). Kebijakan Pendidikan Dalam Kebijakan Publik. *Jurnal Serunai Administrasi Pendidikan*, 9(1), 34–44. <https://doi.org/10.37755/jsap.v9i1.250>
- Dwi, F. E., Maullana, H., Utami, H. O., & Wijaya, H. A. (2024). Implementasi Kebijakan Pendidikan terhadap Kebijakan Publik. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 7(7), 7094–7100. <https://doi.org/10.54371/jiip.v7i7.4773>
- Feriyanti, Y. G., Judijanto, L., Prananda, G., & Sanulita, H. (2024). Tinjauan Pemanfaatan Kecerdasan Buatan: Pembelajaran Mandiri Pada Keterampilan Bahasa Indonesia. *LITERASI: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia Dan Daerah*, 14(2).
- Friska, S. Y., Amanda, M. T., Novitasari, A., & Prananda, G. (2022). Pengaruh Video Animasi terhadap Hasil Belajar Siswa Muatan Pembelajaran IPA Kelas IV di SD Negeri 08 Sungai Rumbai. *PENDIPA Journal of Science Education*, 6(1), 250–255.
- Gingga, P. (2020). Pengaruh Model Discovery Learning Terhadap Peningkatan Keterampilan Berpikir Kritis dan Self-Confidence Peserta Didik Terna 3 di Kelas IV Sekolah Dasar. In *(Doctoral dissertation, Universitas Negeri Padang)*. <http://repository.unp.ac.id/26903/>
- Sutapa, M. (2008). Kebijakan Pendidikan menggunakan Perspektif Kebijakan Publik. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 02, 12–16.